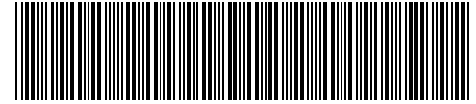




**SURAT PENGESAHAN DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2021
NOMOR : SP DIPA- 005.03.2.400039/2021**



DS:4630-6100-6336-2971

A. Dasar Hukum:

- 1.UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
- 2.UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.
- 3.UU No. 9 Tahun 2020 tentang APBN TA 2021

B. Dengan ini disahkan Alokasi Anggaran Untuk:

1. Kementerian Negara/Lembaga : (005) MAHKAMAH AGUNG
2. Unit Organisasi : (03) Ditjen Badan Peradilan Umum
3. Provinsi : (25) PAPUA
4. Kode>Nama Satker : (400039) PENGADILAN NEGERI JAYAPURA
- Sebesar : Rp. 244.570.000 (DUA RATUS EMPAT PULUH EMPAT JUTA LIMA RATUS TUJUH PULUH RIBU RUPIAH)

Untuk kegiatan-kegiatan sebagai berikut :

Kode dan Nama Fungsi dan Sub Fungsi :

03 KETERTIBAN DAN KEAMANAN
03.04 PERADILAN

Kode dan Nama Program dan Kegiatan :

005.03.BF Program Penegakan dan Pelayanan Hukum
005.03.BF.1049 Peningkatan Manajemen Peradilan Umum

Jumlah Uang

Rp. 244.570.000
Rp. 244.570.000

C. Sumber Dana Berasal Dari :

1. Rupiah Murni	Rp.	244.570.000	4. Pinjaman/Hibah Dalam Negeri	Rp.	0
2. PNBP			- Pinjaman Dalam Negeri	Rp.	0
PNBP TA Berjalan	Rp.	0	- Hibah Dalam Negeri	Rp.	0
3. Pinjaman/Hibah Luar Negeri	Rp.	0	5. Hibah Langsung	Rp.	0
- Pinjaman Luar Negeri	Rp.	0	- Hibah Luar Negeri Langsung	Rp.	0
- Hibah Luar Negeri	Rp.	0	- Hibah Dalam Negeri Langsung	Rp.	0
			6. SBSN PBS	Rp.	0

D. Pencairan dana dilakukan melalui :

1. KPPN JAYAPURA (063) Rp. 244.570.000

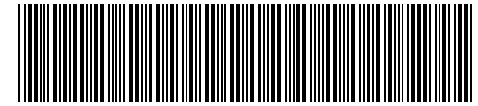
E. Pernyataan Syarat dan Ketentuan (Disclaimer)

1. DIPA Petikan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari DIPA Induk (Nama Program, Unit Organisasi dan Kementerian Negara/Lembaga).
2. DIPA Petikan ini dicetak secara otomatis melalui sistem yang dilengkapi dengan kode pengaman berupa digital stamp sebagai pengganti tanda tangan pengesahan (otentifikasi).
3. DIPA Petikan berfungsi sebagai dasar pelaksanaan kegiatan satker dan pencairan dana/pengesahan bagi Bendahara Umum Negara/Kuasa Bendahara Umum Negara.
4. Rencana Penarikan Dana dan Perkiraan Penerimaan yang tercantum dalam Halaman III DIPA diisi sesuai dengan rencana pelaksanaan kegiatan.
5. Tanggung jawab terhadap penggunaan anggaran yang tertuang dalam DIPA Petikan sepenuhnya berada pada Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran.
6. Dalam hal terdapat perbedaan data antara DIPA Petikan dengan database RKA-K/L-DIPA Kementerian Keuangan maka yang berlaku adalah data yang terdapat di dalam database RKA-K/L-DIPA Kementerian Keuangan (berdasarkan bukti-bukti yang ada).
7. DIPA Petikan berlaku sejak tanggal 1 Januari 2021 sampai dengan 31 Desember 2021.

JAKARTA, 23 November 2020
A.N MENTERI KEUANGAN
DIREKTUR JENDERAL ANGGARAN

ttd.
ASKOLANI
NIP. 196606111992021001

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2021
NOMOR : DIPA- 005.03.2.400039/2021
I A. INFORMASI KINERJA**



DS:4630-6100-6336-2971

Kementerian Negara/Lembaga : (005) MAHKAMAH AGUNG
Unit Organisasi : (03) Ditjen Badan Peradilan Umum
Provinsi : (25) PAPUA
Kode>Nama Satker : (400039) PENGADILAN NEGERI JAYAPURA

Halaman : I A. 1

Program	:	005.03.BF	Program Penegakan dan Pelayanan Hukum			244.570.000
Kegiatan	:	1049	Peningkatan Manajemen Peradilan Umum			244.570.000
Indikator Kinerja Kegiatan	:	1. 01	Jumlah layanan dukungan perkara peradilan umum			
		2. 02	Jumlah jam layanan yang diberikan pos bantuan hukum pada pengadilan			
		3. 03	Jumlah perkara yang diselesaikan melalui sidang diluar gedung pengadilan			
		4. 04	Jumlah perkara peradilan umum yang diselesaikan melalui pembebasan biaya perkara			
		5. 05	Jumlah perkara peradilan umum yang diselesaikan di tingkat pertama dan tingkat banding tepat waktu			
		6. 06	Persentase putusan yang menggunakan pendekatan keadilan restorative di Mahkamah Agung			
Klasifikasi Rincian Output 1	:	1049.BCA	Perkara Hukum Perseorangan	345,00	Perkara	203.770.000
Rincian Output	:	01 BCA.143	Perkara Pidana yang Diselesaikan Ditingkat Pertama di Wilayah Papua	280,00	Perkara	126.560.000
		02 BCA.144	Perkara Pidana Korupsi yang Diselesaikan Ditingkat Pertama di Wilayah Papua	35,00	Perkara	36.260.000
		03 BCA.145	Perkara PHI (dibawah 150 juta) yang Diselesaikan di Tingkat Pertama di Wilayah Papua	30,00	Perkara	40.950.000
Klasifikasi Rincian Output 2	:	1049.QBA	Layanan Bantuan Hukum Perseorangan	144,00	Orang	40.800.000
Rincian Output	:	01 QBA.032	Pos Bantuan Hukum (PN)	144,00	Orang	40.800.000

JAKARTA, 23 November 2020
Direktur Jenderal Badilum

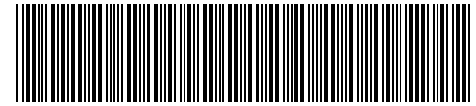
ttd.
Dr. H. Prim Haryadi, S.H., M.H.
NIP 196303251988031001

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN

TAHUN ANGGARAN 2021

NOMOR : DIPA- 005.03.2.400039/2021

I B. SUMBER DANA



DS:4630-6100-6336-2971

Kementerian Negara/Lembaga : (005) MAHKAMAH AGUNG
 Unit Organisasi : (03) Ditjen Badan Peradilan Umum
 Provinsi : (25) PAPUA
 Kode>Nama Satker : (400039) PENGADILAN NEGERI JAYAPURA

1. Anggaran Tahun 2021	Rp.	244.570.000	Ket :	a. Pinjaman Luar Negeri (1) Valuta Asing	US\$	Pagu	0	Rp.	Ekuivalen Rupiah	0
1. Rupiah Murni	Rp.	244.570.000		(2) RPLN	US\$		0	Rp.		0
2. PNPB	Rp.	0		b. Hibah Luar Negeri (1) Valuta Asing	US\$		0	Rp.		0
3. Pinjaman/Hibah Luar Negeri	Rp.	0		(2) RHLN	US\$		0	Rp.		0
4. Pinjaman/Hibah Dalam Negeri	Rp.	0		c. Pinjaman Dalam Negeri	IDR		0			
5. Hibah Langsung	Rp.	0		d. Hibah Dalam Negeri	IDR		0			
6. SBSN PBS	Rp.	0		e. Hibah Luar Negeri Langsung	IDR		0			
2. Rincian Pinjaman / Hibah :				f. Hibah Dalam Negeri Langsung	IDR		0			

(dalam ribuan rupiah)

No.	SUMBER PINJAMAN DAN HIBAH No. NPP/H per Tahun No. Register		PAGU TAHUN INI		RINCIAN DANA BERDASARKAN CARA PENARIKAN		DANA PENDAMPING		
	Kode	Uraian	Kode	Dana	Kode	Dana	Rp. Pdp	Rp.LN	Rp.Loc.Cost
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2021
NOMOR : DIPA- 005.03.2.400039/2021
II. RINCIAN PENGELUARAN**



DS:4630-6100-6336-2971

Kementerian Negara/Lembaga : (005) MAHKAMAH AGUNG
Unit Organisasi : (03) Ditjen Badan Peradilan Umum
Provinsi : (25) PAPUA
Kode>Nama Satker : (400039) PENGADILAN NEGERI JAYAPURA
Kewenangan : (KD)

Halaman : II. 1
(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN SATKER/PROGRAM/KEGIATAN/KRO/SUMBER DANA	BELANJA						LOKASI/ KPPN	CARA PENARIKAN/ REGISTER
		PEGAWAI [51]	BARANG [52]	MODAL [53]	BANTUAN SOSIAL [57]	LAIN-LAIN [58]	JUMLAH SELURUH 8		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
400039	PENGADILAN NEGERI JAYAPURA	-	244.570	-	-	-	244.570		
005.03.BF	Program Penegakan dan Pelayanan Hukum	-	244.570	-	-	-	244.570		
1049	Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	-	244.570	-	-	-	244.570		
1049.BCA	Perkara Hukum Perseorangan (25.01 PAPUA / KAB. JAYAPURA)	-	203.770	-	-	-	203.770	25 . 01	
01	RM	-	203.770	-	-	-	203.770	063	
1049.QBA	Layanan Bantuan Hukum Perseorangan (25.01 PAPUA / KAB. JAYAPURA)	-	40.800	-	-	-	40.800	25 . 01	
01	RM	-	40.800	-	-	-	40.800	063	
JUMLAH		-	244.570	-	-	-	244.570		

JAKARTA, 23 November 2020
Direktur Jenderal Badilum

ttd.
Dr. H. Prim Haryadi, S.H., M.H.
NIP 196303251988031001

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2021
NOMOR : DIPA- 005.03.2.400039/2021
III. RENCANA PENARIKAN DANA DAN PERKIRAAN PENERIMAAN**



DS:4630-6100-6336-2971

Kementerian Negara/Lembaga : (005) MAHKAMAH AGUNG
Unit Organisasi : (03) Ditjen Badan Peradilan Umum
Provinsi : (25) PAPUA
Kode>Nama Satker : (400039) PENGADILAN NEGERI JAYAPURA

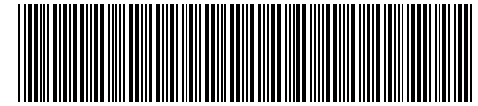
Halaman : III. 1
(dalam ribuan rupiah)

NO	KODE	URAIAN SATKER	RENCANA PENARIKAN												JUMLAH SELURUH
			JANUARI	FEBRUARI	MARET	APRIL	MEI	JUNI	JULI	AGUSTUS	SEPTEMBER	OKTOBER	NOVEMBER	DESEMBER	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1.	400039	PENGADILAN NEGERI JAYAPURA													
		RENCANA PENARIKAN DANA	20.368	20.368	20.368	20.368	20.368	20.368	20.368	20.368	20.368	20.368	20.368	20.522	244.570
		BELANJA BARANG	20.368	20.368	20.368	20.368	20.368	20.368	20.368	20.368	20.368	20.368	20.368	20.522	244.570
	005.03.BF.1049	Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	20.368	20.368	20.368	20.368	20.368	20.368	20.368	20.368	20.368	20.368	20.368	20.522	244.570
		52 BELANJA BARANG DAN BARANG	20.368	20.368	20.368	20.368	20.368	20.368	20.368	20.368	20.368	20.368	20.368	20.522	244.570
		PERKIRAAN PENERIMAAN	7.937	7.937	7.937	7.937	7.937	7.937	7.937	7.937	7.937	7.937	7.937	7.966	95.273
		- PNBP (425231)	255	255	255	255	255	255	255	255	255	255	255	265	3.070
		- PNBP (425232)	448	448	448	448	448	448	448	448	448	448	448	448	5.376
		- PNBP (425233)	2.487	2.487	2.487	2.487	2.487	2.487	2.487	2.487	2.487	2.487	2.487	2.498	29.855
		- PNBP (425239)	4.747	4.747	4.747	4.747	4.747	4.747	4.747	4.747	4.747	4.747	4.747	4.755	56.972

JAKARTA, 23 November 2020
Direktur Jenderal Badilum

ttd.
Dr. H. Prim Haryadi, S.H., M.H.
NIP 196303251988031001

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2021
NOMOR : DIPA- 005.03.2.400039/2021
IV A. B L O K I R**



DS:4630-6100-6336-2971

Kementerian Negara/Lembaga : [005] MAHKAMAH AGUNG
Unit Organisasi : [03] Ditjen Badan Peradilan Umum
Provinsi : [25] PAPUA
Kode dan Nama Satker : [400039] PENGADILAN NEGERI JAYAPURA

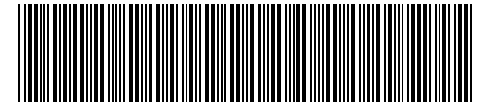
Halaman : IV.A. 1
(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN	KODE	URAIAN

JAKARTA, 23 November 2020
Direktur Jenderal Badilum

ttd.
Dr. H. Prim Haryadi, S.H., M.H.
NIP 196303251988031001

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2021
NOMOR : DIPA- 005.03.2.400039/2021
IV B. C A T A T A N**



DS:4630-6100-6336-2971

Kementerian Negara/Lembaga : [005] MAHKAMAH AGUNG
Unit Organisasi : [03] Ditjen Badan Peradilan Umum
Provinsi : [25] PAPUA
Kode dan Nama Satker : [400039] PENGADILAN NEGERI JAYAPURA

Halaman : IV.B. 1
(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN	KODE	URAIAN

JAKARTA, 23 November 2020
Direktur Jenderal Badilum

ttd.
Dr. H. Prim Haryadi, S.H., M.H.
NIP 196303251988031001